

BAB I

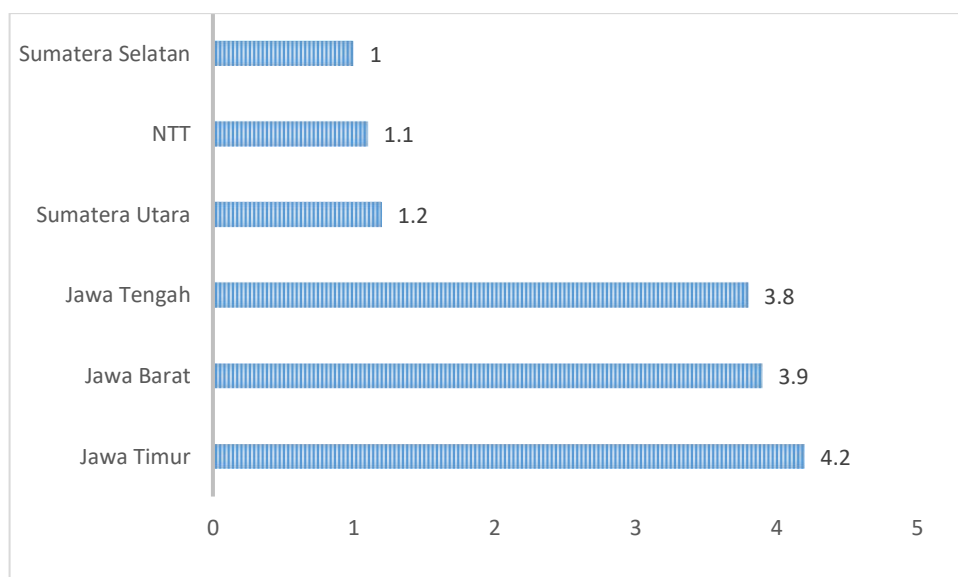
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan menjadi masalah global yang dihadapi oleh semua negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Seseorang dapat dikatakan miskin karena tidak memiliki tempat tinggal, kekurangan pangan atau memiliki kesehatan yang buruk. Kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang keluarga atau anggota masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar sebagaimana anggota masyarakat lain pada umumnya Syami dalam (Humairoh, 2020).

Kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional yang tidak hanya melibatkan faktor ekonomi, tetapi juga sosial, budaya dan politik. Masalah kemiskinan dianggap sebagai salah satu penghambat proses pembangunan suatu negara. Salah satu negara yang masih dibelit oleh masalah kemiskinan adalah Indonesia. Di Indonesia, masalah kemiskinan masih menjadi sorotan utama terkait dengan usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Masalah kemiskinan masih menjadi sorotan utama terkait dengan usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang terus meningkat sehingga tingkat kesejahteraan rakyat masih jauh di bawah tingkat kesejahteraan negara maju. Semua negara di dunia sepakat bahwa kemiskinan merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban (Suryandari, 2018).

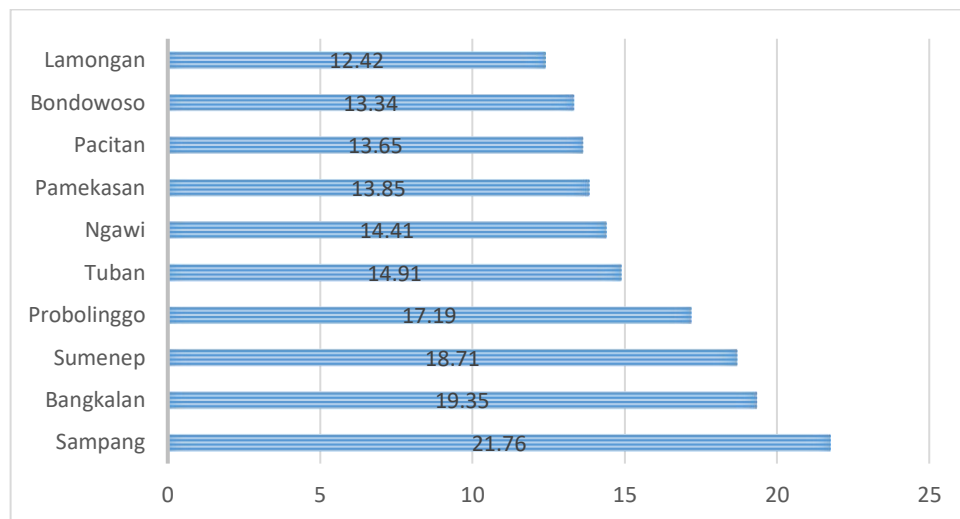
Data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 ada 25,90 juta penduduk miskin, dibandingkan september 2022 jumlah penduduk miskin lebih tinggi 26,36 juta penduduk miskin. 10 Provinsi penduduk miskin tertinggi dibandingkan provinsi lainnya. Tiga provinsi di pulau Jawa memiliki penduduk miskin yang lebih banyak dibandingkan dengan provinsi lainnya. Ketiga provinsi tersebut adalah Jawa Timur dengan jumlah penduduk miskin 4,2 juta jiwa, Jawa Tengah 3,9 juta jiwa, dan Jawa Barat 3,8 juta jiwa.



Gambar 1.1 Provinsi Penduduk Miskin Tertinggi Di Indonesia Per Maret 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

Gambar 1.1 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 ada provinsi Jawa Timur 4,2 juta jiwa jumlah tertinggi penduduk miskin di Indonesia, kedua ada Provinsi Jawa Barat 3,9 juta jiwa penduduk miskin, ketiga Provinsi Jawa Tengah 3,8 juta jiwa, keempat Provinsi Sumatera Utara 1,2 juta jiwa, kelima Provinsi NTT 1,1 juta jiwa dan terakhir Sumatera Selatan 1 juta jiwa penduduk miskin.



Gambar 1.2 Kabupaten Penduduk Miskin Tertinggi Jawa Timur 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

Gambar 1.2 menunjukan Sebanyak 10 dari 39 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Tiga Kabupaten di pulau Madura yaitu pertama, Sampang kedua Bangkalan ketiga Sumenep, memimpin Pemerintah Daerah Tingkat Jawa Timur dengan persentase kemiskinan tertinggi. (Rinanti, 2017) menyatakan empat penyebab utama kemiskinan. Pertama, tidak adanya akses ke pasar kerja. Lapangan kerja dan kesempatan kerja harus menjadi prioritas untuk mengentaskan kemiskinan. Langsung atau tidak langsung, orang yang tidak memiliki pekerjaan tentunya tidak memperoleh pendapatan. Jika tidak memperoleh pendapatan tentu dia sulit membiayai hidupnya sehari-hari, apalagi kebutuhan keluarganya. Kedua, kemiskinan bisa diakibatkan oleh kerusakan lingkungan atau hilangnya habitat. Kerusakan lingkungan dan sempitnya lahan mengakibatkan terganggunya lahan pertanian. Akibatnya, mereka tidak mempunyai lahan untuk ditanami berbagai keperluan sehari-hari. Para petani terdesak oleh laju modernisasi sehingga menjual lahannya untuk pembangunan. Ketiga, pelayanan sosial yang tidak memadai.

Pelayanan sosial ini berupa layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan publik lainnya. Keempat, tidak diikutsertakannya dalam proses kebijakan. Kepedulian dalam kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kaum miskin perlu ada keterwakilan di lembaga-lembaga formal, lembaga eksekutif dan legislatif. Dengan begitu, ada keinginan politik yang berpihak kepada rakyat miskin, juga untuk mengentaskan kemiskinan.

Pembangunan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat pembangunan menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya lala kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya merupakan tujuan dan *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup diantaranya tanpa kemiskinan tanpa kelaparan dan kehidupan sejahtera. Upaya pencapaian target SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan, sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pengentasan penduduk miskin menjadi salah satu prioritas pembangunan yang ada di Indonesia termasuk juga di pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan desa. SDGs ini menjadi komitmen untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang lebih baik lagi. Setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan SDGs dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dalam setiap keputusan dan tindakan, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik dan lebih

berkelanjutan bagi generasi akan datang (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, 2024).

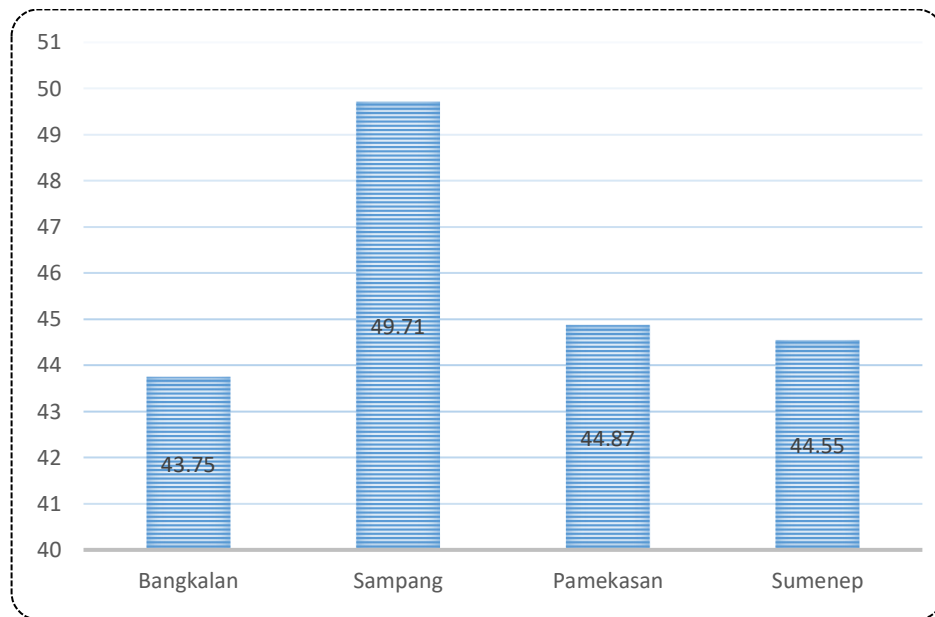
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, serta diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana pelaksanaan otonomi daerah yang telah dimulai sejak tahun 2001, *Internasional NGO Forum on Indonesia Development INFID* (2016) menyebutkan keberhasilan SDGs di dapat dilepas dari peranan penting Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu berperan untuk membantu mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan pada kenyataan bahwa pemerintah daerah memiliki dana dan berwenang untuk melakukan inovasi dalam bentuk pelayanan publik dan kebijakan lainnya. Sesuai dengan Teori ekonomi Keynes dalam prinsip ekonomi makro yang membahas tentang peran pemerintah dalam ekonomi. Menurut teori ini, pemerintah memiliki peran penting dalam mengelola ekonomi, teori ekonomi Keynesian juga digunakan untuk merujuk pada konsep bahwa kinerja ekonomi yang optimal dapat dicapai dan kemerosotan ekonomi dapat dicegah dengan mempengaruhi permintaan agregat melalui kebijakan stabilisasi dan intervensi ekonomi oleh pemerintah (Pujoharso, 2012).

Peraturan Presiden (Perpres) *Sustainable Development Goals* (SDGs) Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Agar setiap daerah sudah harus mulai mengimplementasikan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk tercapainya tujuan di tahun 2030 akan datang serta menyesuaikan dengan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dibuat oleh pemerintah pusat.

Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan global yang dilaksanakan upaya pembangunan nasional dan daerah.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan komitmen dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dan sasaran global tahun 2030 yang dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang di Sidang Umum PBB pada September 2015. 17 Tujuan tersebut yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan (2) Tanpa Kelaparan (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera (4) Pendidikan Berkualitas (5) Kesenjangan Gender (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak (7) Energi Bersih dan Terjangkau (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur (10) Berkurangnya Kesenjangan (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (13) Penanganan Perubahan Iklim (14) Ekosistem Lautan (15) Ekosistem Daratan (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Wahyuningsih, 2018).

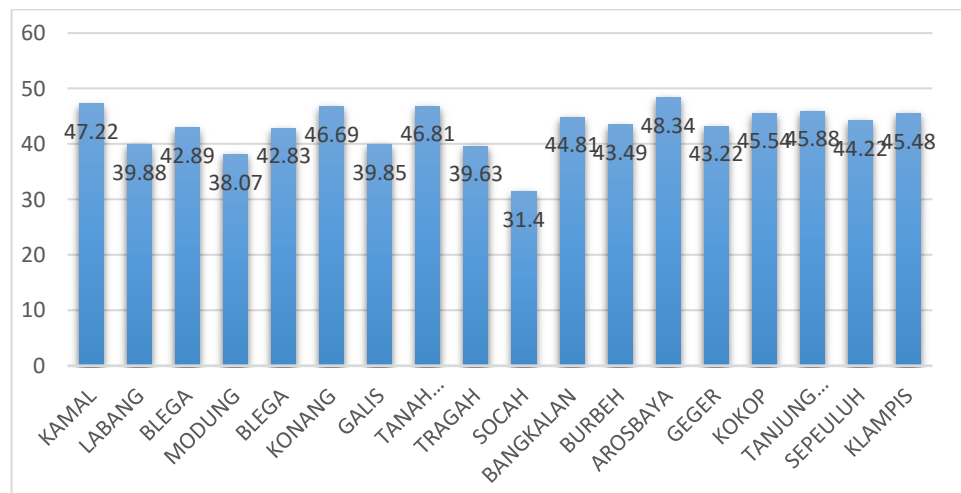
Sustainable Development Goals (SDGs) dalam konteks ketahanan Nasional dapat menjadi perekat dan pemersatu kepentingan nasional. Sebab seluruh masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras dan preferensi politiknya tentu menginginkan peningkatan kualitas hidup di masa depan. Agar hasil SDGs dapat optimal dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat, maka seluruh elemen negara baik pemerintah, rakyat, harus hadir untuk memahami dan turut serta berkontribusi menyukseskan program jangka panjang ini (Irhamisyah, 2019).



Gambar 1.3 Skor SDGs Kabupaten Pulau Madura Tahun 2023

Sumber: Kementrian Desa, 2023

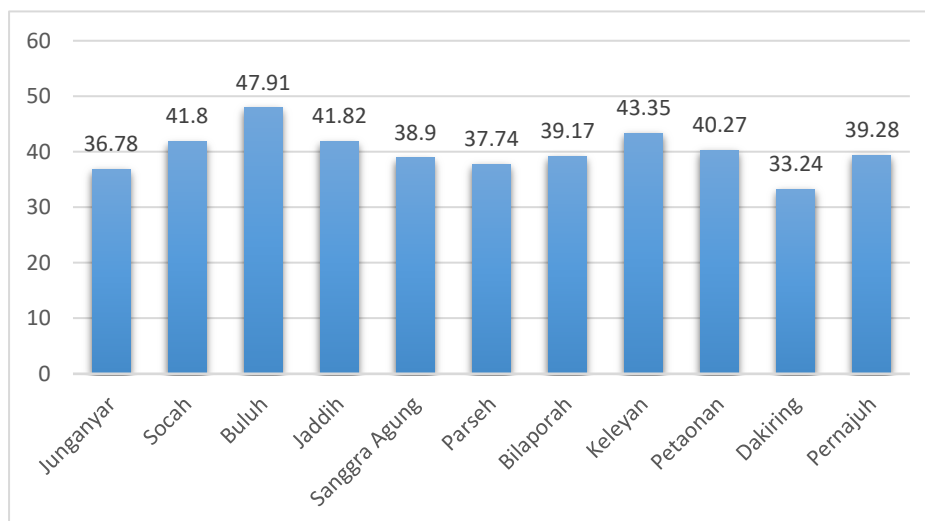
Gambar 1.3 Menunjukkan capaian SDGs 4 Kabupaten di Pulau Madura. Skor SDGs tertinggi yaitu Kabupaten Sampang 49,71 persen, sedangkan skor SDGs terendah yaitu Kabupaten Bangkalan 43,74 persen. Untuk mencapai tujuan SDGs, dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama. SDGs ini menjadi komitmen untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang lebih baik lagi. Setiap Daerah, termasuk di Pulau Madura, memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan SDGs. Dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dalam setiap keputusan dan tindakan, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi generasi akan datang.



Gambar 1.4 Skor SDGs Perkecamatan Kabupaten Bangkalan 2023

Sumber: Kementrian Desa, 2023

Gambar 1.4 menunjukkan capaian SDGs 18 kecamatan Kabupaten Bangkalan. Semakin besar skor menunjukkan semakin tercapainya goals SDGs. Capaian SDGs paling tinggi diduduki oleh kecamatan Arosbaya 48,34 persen. Sedangkan capaian SDGs paling rendah diduduki oleh kecamatan Socah 31,4 persen. Salah satu masalah penting yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi adalah antara pemenuhan kebutuhan pembangunan dengan upaya mempertahankan kelestarian lingkungan (Ridwan, 2022). Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam yang tidak memerhatikan aspek kelestarian lingkungan pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan itu sendiri. Karena, pada dasarnya sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi yang tidak memerhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menyebabkan permasalahan pembangunan di kemudian hari.



Gambar 1.5 Skor SDGs Desa Kecamatan Socah

Sumber: Kementerian Desa, 2023

Gambar 1.5 menunjukkan grafik capaian skor SDGs Desa paling tinggi diduduki oleh Desa Buluh. Sedangkan capaian skor SDGs Desa paling rendah diduduki oleh Desa Dakiring. Saat ini, data di atas menggambarkan kemiskinan di Desa Dakiring masih menjadi problem, agenda utama SDGs adalah penghapusan kemiskinan di dunia pada tahun 2030. Oleh karena itu, dalam *Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development*, telah disebutkan tujuan utama pembangunan dengan kemiskinan harus di atasi dalam segala bentuk dimanapun. Tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu, pertama indikator yang melekat pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya pendidikan, kesehatan. Indikator kedua yang melekat pada lingkungan kecilnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental*

Development), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik (Wahyuningsih, 2018).

Bukti keseriusan Pemerintah dalam capaian SDGs Pemerintah Indonesia membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ditingkat pusat dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat daerah pada tahun 2010. Strategi tersebut berupa program perlindungan sosial berbentuk bantuan-bantuan sosial. Untuk menunjang dan mewujudkan program tersebut pemerintah membuat empat strategi yakni memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat miskin dan menciptakan pembangunan yang inklusif. Program yang dibuat oleh TNP2K yakni berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Program-programnya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sedangkan dalam pemerintahan Daerah Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan dengan menyalurkan program PPKS.

Program Keluarga Harapan (PKH) mulai disalurkan pada tahun 2007 PKH merupakan program bantuan tunai bersyarat kepada RTSM jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan kriteria kemiskinan menurut BPS. Program PKH mencakup komponen yaitu pendidikan, kesehatan, disabilitas & lansia. Tujuan dari program PKH Pendidikan adalah untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya bagi anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), serta mengurangi angka pekerja anak (Humairoh, 2020). PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

PKH digagas dan dijalankan sebagai upaya pengentasan kemiskinan berbasis rumah tangga. Saat ini regulasi tentang PKH diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mulai di salurkan pada tahun 2017 BPNT merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai atau Kartu Sembako, yang diberikan pemerintah pada masyarakat kurang mampu. Untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengatasi kemiskinan. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita bangsa (Hasimi, 2020). Dasar hukum BPNT Dikeluarkannya satu kebijakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat tentunya memiliki landasan yang dijadikan dasar pengaturan dalam berjalannya kebijakan tersebut, adapun landasan atau dasar hukum dari kebijakan pemerintah terkait program Bantuan Pangan Non Tunai ini, ialah: Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2017, terkait penyaluran bantuan sosial secara non tunai.

Program Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) mulai di salurkan pada tahun 2018 PPKS Merupakan perseorangan, keluarga. Kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). PPKS memiliki keterbatasan baik secara fisik, psikis, maupun sosial, sehingga tidak mampu, memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peran dan fungsi sosialnya serta tidak mampu mengakses program-program pembangunan. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial, pasal 5 ayat (2), Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ini dikelompokkan dalam permasalahan.

- a) Kemiskinan.
- b) Keterlantaran.
- c) Kecacatan.
- d) Keterpencilan.
- e) Ketunaan social dan penyimpangan perilaku.
- f) Korban bencana, dan/atau
- g) Korban tindak kekerasan ,eksploitasi dan diskriminasi

Melihat kemiskinan dalam rangka multidimensi, jadi bukan hanya terkait ukuran pendapatan, seperti yang pertama, kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin. Kedua, menyangkut ada/tidak adanya pemenuhan hak dasar warga dan ada/tidak adanya perbedaan perilaku seseorang atau kelompok masyarakat alam menjalani kehidupan secara bermartabat (Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, 2021).

Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu institusi penyelenggara pembangunan sosial yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Sebagaimana juga tercantum dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat (2) disebutkan, “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. (Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, 2021)

Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan upaya capaian SDGs yaitu melakukan program bantuan sosial. Kebijakan yang dilakukan dituangkan dalam program-program pembangunan sosial yang diberikan diharapkan mampu mengurangi angka masalah kemiskinan dan SDGs mencapai angka *goals*.

Tabel 1. 1 Program Dinas Sosial Desa Dakiring 2023

NO	JENIS PROGRAM	KK PENERIMA BANTUAN	SASARAN	BANTUAN	JUMLAH KK DESA DAKIRING
1	PKH	206	Ibu hamil/nifas, anak usia dini, lansia dan penyandang disabilitas.	Ibu hamil : Rp750.000 pertahap Balita:Rp750.000 pertahap Lansia:Rp600.000 pertahap Disabilitas Rp:600.000 pertahap SD:Rp225.000 pertahap SMP:Rp370.000 pertahap SMA:Rp500.000 pertahap	826
2	BPNT	366	Masyarakat miskin.	Rp. 200.000 perbulan.	
3	PPKS	30	Fakir miskin, rehabilitasi social anak, lanjut usia, penyandang tuna social dan disabilitas.	Rp200.000 pertahap	
Total program DINSOS Bangkalan		602			

Sumber: Data Primer, 2023

Data yang diperoleh dari Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Dapat disimpulkan, bahwa program Dinas Sosial Kabupaten

Bangkalan yang terdapat di Desa Dakiring terdapat 3 program yaitu program PKH dengan jumlah penerima 206 KK, program BPNT dengan jumlah penerima 366 KK dan program PPKS dengan jumlah penerima 30 KK, Sedangkan total KK Desa Dakiring Kecamatan Socah ini dengan jumlah 826 KK. Hal ini menggambarkan hampir semua KK mendapatkan program Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

PKH, BPNT dan PPKS adalah bukti bahwa keseriusan Pemerintah dalam capaian SDGs. Seharusnya program yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan ini diharapkan capaian SDGs Desa mencapai *goals* di Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Program-program yang diberikan kepada masyarakat haruslah program yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti memperbaiki pendidikan dan kesehatan, karena untuk keluar dari lingkaran kemiskinan jalan satu-satunya dapat diwujudkan jika masyarakat itu sehat dan cerdas. Jika masyarakat sehat dan cerdas maka masyarakat itu dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dengan cara mereka sendiri (Humairoh, 2020). Faktanya dalam capaian SDGs Desa melalui program Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan yaitu Program PKH, BPNT, dan PPKS di Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan tersebut masih rendah bahkan paling rendah di antara Desa-desa lain di Kecamatan Socah.

Melihat masalah yang diatas dapat dilihat, Program-program ini merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam keseriusannya pada SDGs. Namun demikian, ada berbagai isu atau fenomena yang muncul dilapangan dimana ada kesenjangan program keluarga harapan yang telah didesain pemerintah melalui Kementrian Sosial Kabupaten Bangkalan pada aplikasinya dilapangan,

dan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul maka program Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan terus melakukan penilaian atau evaluasi.

William N. Dunn mengatakan istilah evaluasi kebijakan dapat disamakan dengan suatu penafsiran, penilaian dan pemberian angka. Dalam hal ini evaluasi mengenai nilai dan manfaat suatu hasil kebijakan, artinya dalam evaluasi kebijakan harus memberikan informasi yang jelas dan dapat dipercaya mengenai kinerja suatu kebijakan. Lebih jelas Dunn mengatakan bahwa evaluasi memberikan sumbangan pemikiran terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target (Huda et al., 2021). Pada umumnya sebuah nilai dapat dikritik dengan menanyakan secara mendalam sebuah kesiapan tujuan dan target. Menurut William N. Dunn ada 6 kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas, ketepatan.

1. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung arti dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. William N. Dunn menyatakan bahwa efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya (Dunn, 1999).
2. Efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimal sehingga suatu tujuan akan tercapai. William N. Dunn berpendapat bahwa efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara

efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya di ukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi

3. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengatakan bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 1999). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur seberapa jauh alternative pilihan dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan permasalahan.
4. Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti sama dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berdasar pada perataan adalah kebijakan yang usahanya secara adil dapat dirasakan Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.
5. Responsifitas dalam kebijakan publik berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat

memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang kurang baik berupa penolakan. Dunn pun mengemukakan bahwa, responsivitas adalah hal penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan (Dunn, 1999).

6. Ketepatan mengaju pada nilai-nilai dari tujuan suatu program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut, William N. Dunn mengatakan bahwa kelayakan adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan

Program Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan dalam upaya capaian SDGs Desa Dakiring, menjadi sangat perlu dievaluasi agar memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu tentang seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai karena di dalam pelaksanaan program Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan belum dapat dikatakan sukses, dapat dilihat capaian SDGs Desa di Desa Dakiring menempati angka capaian SDGs Desa terendah

di Kecamatan Socah. Maka penulis mengangkat judul “Evaluasi Program Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Terhadap Capaian SDGs Desa (Studi Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana evaluasi program Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan terhadap capaian SDGs Desa (Studi Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis evaluasi program Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan terhadap capaian SDGs Desa (Studi Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai evaluasi program Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan terhadap capaian SDGs Desa (studi Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan). Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Teoritis: Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan konsep/teoritis terkait pada teori/konsep administrasi kebijakan publik, khususnya evaluasi program Dinas Sosial.
2. Praktis: Manfaat bagi pihak Dinas Sosial penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terkait program di kantor Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan untuk evaluasi program yang lebih baik di masa mendatang agar capaian SDGs mencapai angka *goals* di Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.